

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Membicarakan hukum pidana berarti tidak terlepas dari permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri. “Hukum pidana apabila dipandang secara menyeluruh di dalamnya ada tiga permasalahan pokok, yaitu: <sup>1</sup>

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu.”

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa “hukum pidana, sebagai objek ilmu hukum pidana, pada dasarnya lebih merupakan objek yang abstrak.”<sup>2</sup> Objek hukum pidana yang lebih konkrit, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran

---

<sup>1</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 5.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994, hal. 3.

(adressat) dari hukum pidana itu sendiri, perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa / aparat penegak hukum.

Bahkan untuk kejahatan-kejahatan yang telah diatur dalam perundang-undangan pun sering mengalami perkembangan seperti kejahatan (tindak pidana) dibidang narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti dulu hanya dikenal yang namanya candu, tetapi dalam perkembangannya sekarang muncul seperti heroin, morfin dan belum lagi hasil dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan seperti amfetamin dan lain sebagainya (yang tergolong psikotropika).

Dewasa ini, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana telah terjadi ledakan teknologi yang hampir mempengaruhi setiap perkembangan individu baik yang berpengaruh positif ataupun yang berdampak negatif. Demikian pula hasil teknologi yang gemilang ini karena sifat dan karakternya telah disalahgunakan.

Penyalahgunaan oleh korban dan kemudian dijadikan “kumpulan bisnis haram” yang memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan para pengedar gelapnya. Sementara korban yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan, pada gilirannya akan mati merana setelah harta dan miliknya habis.

“Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap,

penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkoba tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri.”<sup>3</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, sebagai berikut: <sup>4</sup>

“Bahwa bahaya dan akibat narkoba jika disalahgunakan dapat bersifat:

1. Bahaya pribadi bagi si pemakai;
2. Bahaya sosial (kemasyarakatan)”

Penyalahgunaan obat narkoba selain menimbulkan akibat personality bagi seseorang juga akan menimbulkan akibat yang menyangkut persoalan hukum yang antara lain:

Tidak dapat disangkal lagi bahwasanya bagi seorang pecandu narkoba itu membutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak, sedangkan harga daripada narkoba mahal, “maka bagi mereka yang keadaan ekonominya lemah akan menyebabkan timbulnya pengertian dalam mewujudkan tindak pidana. Hal ini disebabkan orang ketagihan narkoba harus bekerja sama dengan pelanggar hukum baik penjual, pengedar, pemilik dan lain-lain.”<sup>5</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, pada Pasal 115 dan 116 juga menegaskan adanya sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup untuk pemberi, pembawa, maupun pengimpor narkoba

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi dan Amir Muhsin, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 475.

<sup>4</sup> Ibid., hal. 476.

<sup>5</sup> Ibid., hal. 476.

secara tidak sah. Pelaku tindak pidana minimal dikenai pidana empat tahun penjara. Selain itu, pelaku pun masih dapat dikenai sanksi tambahan, yakni denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

“Secara global, UNODC memperkirakan bahwa antara 155 sampai 250 juta orang (3,5-5,7 persen dari penduduk usia 15-64 tahun) menggunakan zat terlarang setidaknya sekali pada tahun 2008. Pada intinya konsumsi obat-obat terlarang ini menimbulkan masalah bagi para korban pengguna narkoba: mereka menyuntikkannya dan/atau dianggap mengalami ketergantungan, menghadapi permasalahan sosial dan kesehatan yang serius sebagai konsekuensinya.”<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana narkoba mungkin sulit dilakukan, karena narkoba merupakan obat-obatan yang membuat pemakai ketergantungan atau kecanduan. Oleh karena itu perlu dilakukan adanya usaha-usaha preventif, tidak hanya dengan menyita barang dan pelakunya saja tetapi juga harus dilakukan dengan mencegah ketetapan pemakaian agar tidak ketergantungan. Tugas yang lain juga dapat mempersiapkan lembaga perawatan dan rehabilitasi. Dapat juga dilakukan dengan membuat kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan kepada anggota keluarganya, masyarakat, dan lain-lain tentang bahaya narkoba, membantu menyelamatkan korban dan pelaku dari bahaya narkoba.

“Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba perlu dilakukan adanya bantuan hukum dari penasihat hukum. Penasihat hukum

---

<sup>6</sup> Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penyalahgunaannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.

dapat mendampingi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Pada prinsipnya diberi kebebasan apakah ia didampingi penasihat hukum. Mereka yang wajib didampingi oleh penasihat hukum adalah yang: diancam dengan pidana mati, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih, tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.”<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam Pasal 54:

*“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis mengangkat penulisan hukum yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Surakarta)”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Dengan mengingat keterbatasan pemikiran serta waktu yang penulis miliki, maka dalam skripsi ini penulis akan membatasi pada pokok permasalahan sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini maka akan dibatasi hanya pada perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana narkotika.

---

<sup>7</sup> Benyamin Asri, 1989, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*, Bandung: Tarsito.

### **C. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih jelas dan terfokus pada bahasan yang menjadi objek dalam penelitian ini, dalam pembahasan permasalahan untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran keterlibatan pelaku dan korban tindak pidana narkoba dalam beredarnya narkoba?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana narkoba?
3. Hak-hak apa yang harus diberikan kepada korban tindak pidana narkoba dalam proses perlindungan hukum?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian disini menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian tentang perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana narkoba adalah:

1. Untuk mendapatkan informasi sejauh mana keterlibatan pelaku dan korban tindak pidana narkoba dalam beredarnya narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan dalam penegakkan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana narkoba.

3. Untuk mengetahui hak-hak yang harus diberikan kepada korban tindak pidana narkoba dalam proses perlindungan hukum.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pembaca.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut Moeljatno seorang ahli hukum pidana berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang dimaksud perbuatan pidana adalah *“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu*

*bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*”.<sup>8</sup> Menurut Simons, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”

Narkotika, sesuai definisi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Pasal 1 angka 1 bahwa:

*“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”*

Saat ini, narkotika terdiri atas Golongan I dan Golongan II. Seiring perkembangan teknologi dan dinamika gaya hidup masyarakat, tidak tertutup kemungkinan daftar jenis narkotika kelak akan semakin panjang.<sup>9</sup>

Narkotika sudah seperti menjadi konsumsi sehari-hari bagi pengguna narkotika, banyak orang yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika hingga ketergantungan dan tak bisa lepas dari zat-zat atau obat-obatan terlarang itu. Resiko kematianpun menjadi faktor penyebab penggunaan narkotika. Peredaran narkotika di berbagai wilayah Indonesia sudah semakin luas, penyebarannya pun unik semisal narkotika dimasukkan kedalam kemasan-kemasan snack atau makanan, dan lain-lain. Penyalahgunaan narkotika mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 54.

<sup>9</sup> Reza Indragiri Amriel, 2008, *Psikologi Kaum Muda Narkotika*, Jakarta: Salemba Humanika, hal.5.



Daya tarik narkoba terletak pada kesanggupan untuk menciptakan perasaan nyaman karena dapat menghilangkan rasa takut, ketergantungan, dan kegugupan secara semu. Pemakai narkoba pada umumnya timbul rasa santai dan gembira. Apabila daya kerja narkoba mulai habis, perasaan high tersebut hilang, timbul bermacam-macam gejala, seperti menguap-nguap, menggigil, berkeringat, hidung dan mata basah, muntah-muntah, otot sakit-sakit, perut sakit dan mual, kemudian halusinasi dan khayalan.<sup>10</sup> Sedangkan penggunaan dosis narkoba yang terlalu banyak dapat menyebabkan kematian.

Subjek dari kepentingan yang “dilindungi oleh hukum pidana dari perbuatan atau tindak pidana yang membahayakan atau merugikannya itu meliputi:<sup>11</sup>

- a. Orang perorangan atau individu;
- b. Masyarakat atau kolektivitas; dan
- c. Negara.”

Pelaku tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:  
ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;  
ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”*

---

<sup>10</sup> Rachman Hermawan, 1986, *Penyalahgunaan Narkoba oleh Para Remaja*, Bandung: Eresco, hal. 13.

<sup>11</sup> Ibid. hal.123.

Jadi pelaku tindak pidana dalam penyalahgunaan narkoba yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan seperti pengedaran narkoba kepada pemakai (korban) yang mengkonsumsi narkoba dapat dipidana. Korban sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saaksi dan Korban bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Perlindungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah “suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”<sup>12</sup>

Perlindungan terhadap pelaku dan korban tindak pidana dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga atau aparat penegak hukum yang berwenang, bisa saja dalam bentuk perlindungan rehabilitasi dengan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap pelaku dan korban tindak pidana narkoba tersebut, memberikan pengawasan dengan baik dan

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi yang Berat*.

benar, membuat efek jera bagi pelaku dan korban tindak pidana narkoba agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebagai tujuan penelitian dapat tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah “penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta.”<sup>13</sup> Dengan memfokuskan masalah mengenai keterlibatan pelaku dan korban tindak pidana narkoba dalam beredarnya narkoba dan kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana narkoba serta hak-hak yang harus diberikan kepada korban tindak pidana narkoba dalam proses perlindungan hukum.

---

<sup>13</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

## 2. Metode Pendekatan

Penulis dalam menggunakan metode pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris jadi pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian yang berkompeten dalam menangani perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta.

## 4. Jenis Data

Data dari penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.<sup>14</sup> Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu di Polresta Surakarta sedangkan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari bahan-bahan dokumen, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dalam hal ini dapat diperoleh dari Polresta Surakarta.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen peraturan-

---

<sup>14</sup> I Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, hal. 25.

peraturan perundang-undangan dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang dapat menunjang kelengkapan penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan wawancara atau tanya jawab langsung dengan permasalahan dari obyek yang diteliti. Wawancara dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara garis besar yang ditujukan kepada pihak Polresta Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Setelah data seluruhnya terkumpul dan lengkap, tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah menganalisa data. Pada tahap ini, data akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif, yaitu data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (wawancara, dokumen), kemudian diproses dalam tiga jalur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengumpulan data.

## **H. Sistematika Skripsi**

Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam empat bab, dimana masing-masing bab tersebut berhubungan satu sama lain. Setiap bab

terbagi lagi menjadi beberapa bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari uraian tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis mengutarakan kerangka teori dari penulisan skripsi, yang terdiri dari: tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perlindungan hukum dan tinjauan umum tentang narkoba.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, bahwa penulis akan menguraikan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkoba mengenai keterlibatan pelaku dan korban tindak pidana narkoba dalam beredarnya narkoba, kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana narkoba dan hak-hak yang diberikan kepada korban tindak pidana narkoba dalam proses perlindungan hukum.

BAB IV terdiri dari Penutup, yang memuat mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.